

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKIP 2020



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA**

Jl. Jend. Sudirman Komplek Perkantoran. Marabahan Kab. Barito Kuala

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 telah selesai disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan kalangan Lembaga Legislatif untuk melihat sejauh mana kemajuan Program dan Kegiatan Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial di setiap daerah selama satu Tahun Anggaran dan merupakan Evaluasi serta Pertanggungjawaban terhadap Kinerja selama melaksanakan Pembangunan di daerah, oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala akan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan Anggaran Tahun 2020 yang telah ditetapkan dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala. Hasil capaian Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tentunya tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Demikian kami sampaikan laporan ini, semoga dapat menjadi bahan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan Strategi dan Kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan Kinerja Dinas Sosial dalam menyelenggarakan dan meningkatkan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

Segenap kritik, saran dan masukan dari semua pihak dengan semangat kerja sama dan kesatuan langkah, semoga menjadi pemicu untuk terus menerus memperbaiki Kinerja pada tahun berikutnya.

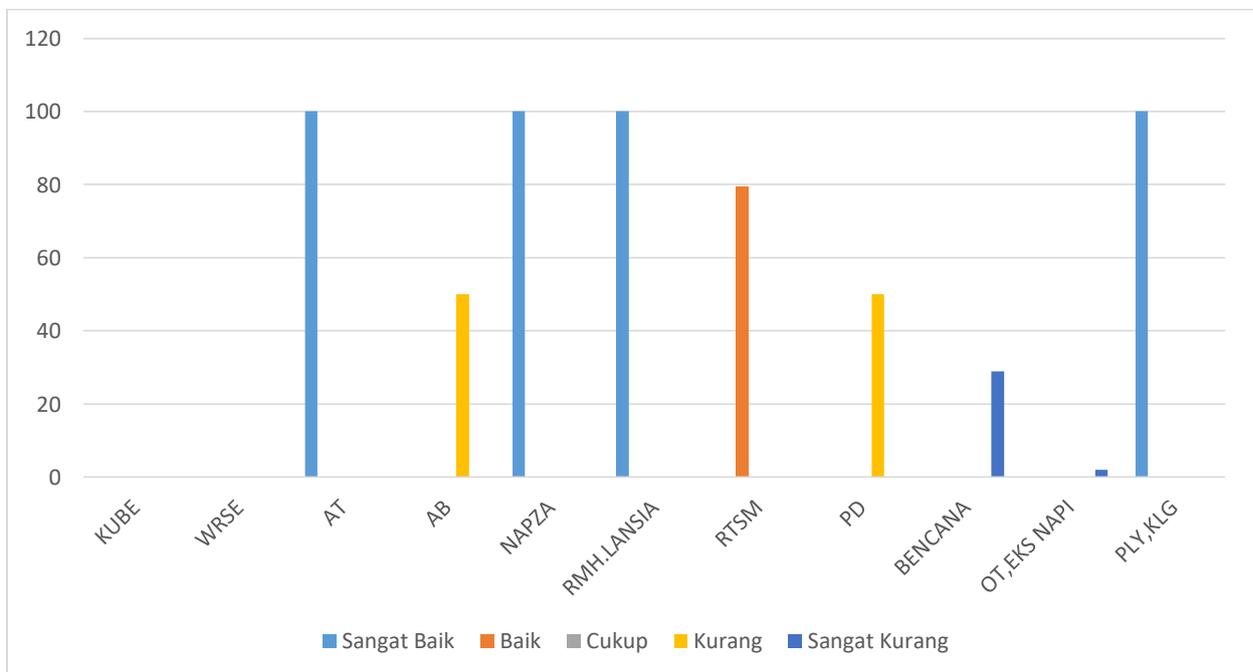
IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelolapemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.

Dengan langkah ini, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan. Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada indikator dengan capaian 5.31 % termasuk kategori sangat baik

yaitu Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri dengan Realisasi Kinerja dicapai dengan Keluarga miskin yang menerima bantuan KUBE tercapai 0 %, Wanita Rawan Sosial Ekonomi tercapai 0 %, Pembinaan Anak Terlantar tercapai 100 %, Kelompok anak beresiko (fisik, seksual, emosional dan ekonomi) tercapai 50 %, Pelayanan NAPZA melalui pencegahan tercapai 100 %, Pelayanan kepada Lansia yang menerima bantuan bedah rumah tercapai 100 %, Pelayanan terhadap Rumah Tangga Miskin tercapai 79,5 %, Pelayanan Penyandang Disabilitas tercapai 50 %, Korban Bencana Alam dan Sosial tercapai 29 %, Penanganan orang Terlantar, eks Napi tercapai 0,1 % dan Pelayanan terhadap keluarga bermasalah sosial psikologis tercapai 100 %.

Grafik Capaian IKU



Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 ditetapkan 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indikator sasaran yang akan dicapai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Target Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	5.31 %	-	-	6		5	%

Tabel diatas menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan 1 (satu) indikator dengan rata-rata capaian adalah 5.31 % dengan kategori sangat baik.



DAFTAR ISI

Halaman	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Diagram	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi	3
1.3 Isu Strategis Organisasi	6
1.4 Landasan Hukum	7
1.5 Sistematisa Penyusunan	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1. Perencanaan Strategis	9
2.1.1 Tujuan	9
2.2.1 Sasaran.....	10
2.2. Perjanjian Kinerja 2020	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Dinas Sosial	16
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	16

3.1.2 Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja.....	18
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis.....	20
3.2.1 Pengukuran Kinerja.....	20
3.2.2 Evaluasi Kinerja.....	23
3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	25
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	28
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022	12
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Tahun 2020	14
Tabel 3.1 Predikat Nilai capaian Kinerja	16
Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja Untuk Rrealisasi Capaian Kinerja Yang Tidak Tercapai	16
Tabel 3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2020.....	17
Tabel 3.1.2 Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Persentase (PMKS) yang Mandiri	18
Tabel 3.1.3 Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori Tahun 2020.....	19
Tabel 3.1.4 Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori Tahun 2020.....	20
Tabel 3.2.1. Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Sosial.....	21
Tabel 3.2.2. Capaian Kinerja sasaran Dinas Sosial Tahun 2020.....	21
Tabel 3.2.3. Rata-rata Capaian Kinerja sasaran Dinas Sosial Berdasarkan IKU Tahun 2020	22
Tabel 3.2.4. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Tahun 2020	22
Tabel 3.2.5. Pencapaian Target sasaran Strategis Dinas Sosial Tahun 2020.....	22
Tabel 3.2.6. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun Ini dengan Realisasi Tahun Lalu	23

Tabel 3.2.7. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra Dinas Sosial	25
Tabel 3.22 Komposisi Belanja Dinas Sosial Tahun 2020	29
Tabel 3.23 Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020.....	30
Tabel 3.25 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Dinas Sosial Tahun 2020	31

DAFTAR GAMBAR

- Gambar * “Struktur Organisasi”
- Gambar 1 “Pengepakan dan Pelepasan Bantuan Sembako Covid Oleh Bupati Barito Kuala”
- Gambar 2 “Menyerahkan Bantuan Kursi Roda pada Anak Penyandang Disabilitas”
- Gambar 3 “Penyerahan Sertifikat Penghargaan Graduasi Berdikari Sejahtera Secara Simbolis. Untuk Peserta PKH yang sudah keluar dari Kepesertaan Secara Mandiri”
- Gambar 4 “Monitoring Bantuan Ternak Kambing di Desa Parimata Kecamatan Belawang”
- Gambar 5 “Kegiatan seleksi PSBR dan PSBW di Dinas Sosial”
- Gambar 6 “Rehab rumah tidak layak huni untuk lanjut usia”
- Gambar 7 “Bantuan Korban Kebakaran 9 KK ”
- Gambar 8 “Pelatihan Keterampilan Membuat Kue Bagi Masyarakat/ KPM Tahun 2020 di Kecamatan Mekarsari”
- Gambar 9 “Penyerahan Bantuan Kambing untuk KUBE "KOLAM BERKAH" Desa Bagagap”
- Gambar 10 “Kegiatan Bimbingan Lanjut Sekaligus Terminasi Eks Klien Panti Sosial Bina Wanita Melati Prov. Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020”
- Gambar 11 “Kegiatan memperingati hari Pahlawan dan pemberian tali asih kepada veteran/janda veteran”

Gambar 12 “Bimtek aplikasi SKRT - SIKS NG bagi petugas Desa/ Kelurahan dalam percepatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Barito Kuala”

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram Capaian IKU	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan Paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan memudahkan Institusi Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan Urusan wajib yang diamanahkan dan menjadi bagian dalam Perencanaan Strategis Tahun 2017-2022. Pada tahun 2020 Dinas Sosial melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan sasaran Kinerja Utamanya adalah Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sasaran kinerja utama ini didukung oleh sasaran kinerja yang lain yang direalisasikan oleh bidang-bidang teknis yang ada pada Dinas Sosial yaitu Meningkatnya Pemberdayaan keluarga miskin, meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar, meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran. Hal terpenting lainnya dalam penyusunan laporan ini adalah pengukuran kinerja serta evaluasi yang merupakan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut, dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang teratur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
2. Mendorong Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai Instansi Pemerintah dalam lingkup Kabupaten Barito Kuala bertugas melaksanakan urusan di bidang Sosial dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang uraian tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

Tugas :

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Fungsi :

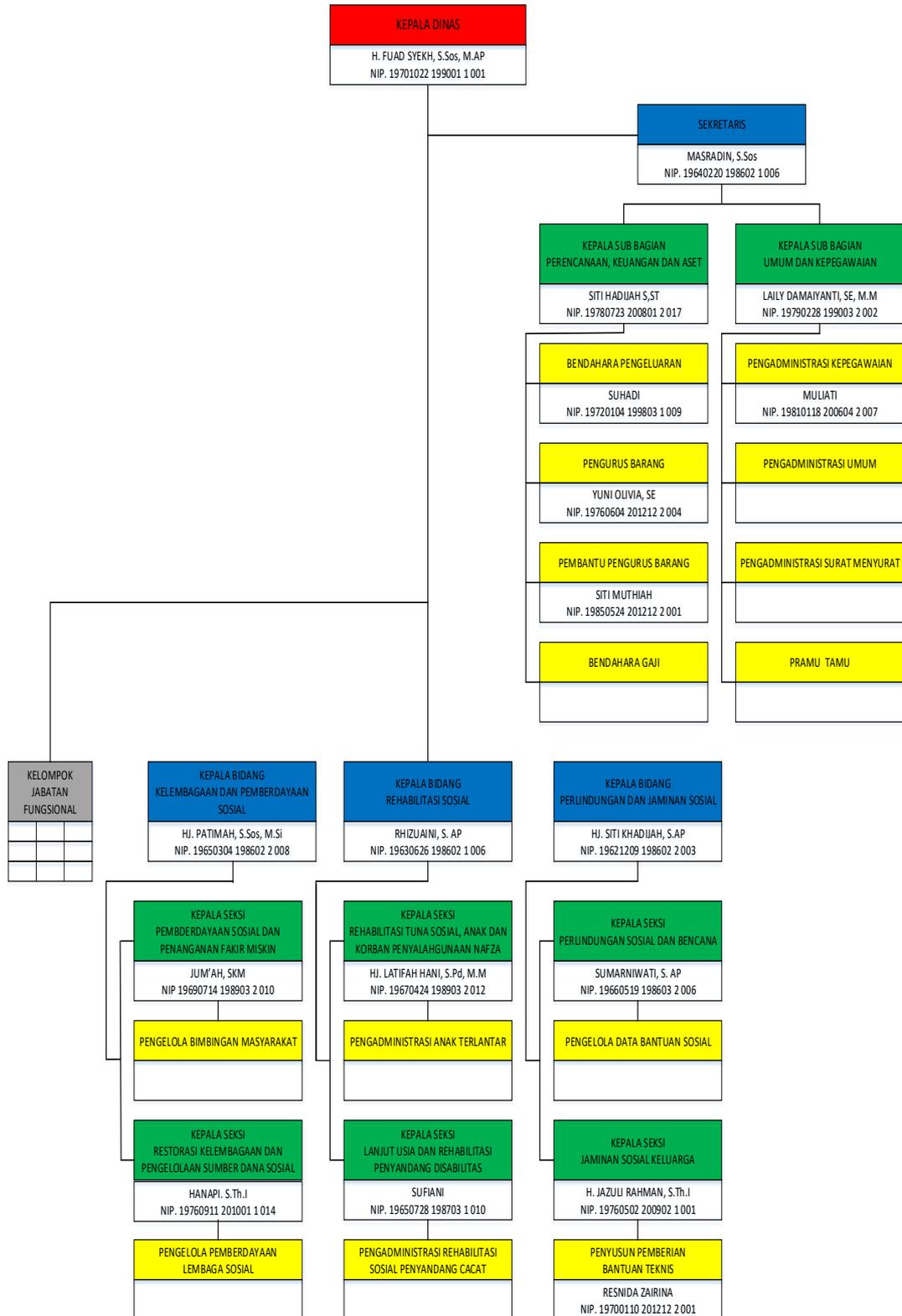
Dinas Sosial Kabupaten Barito kuala melaksanakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.

4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

1.3 Isu Strategis Organisas

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, telaah tujuan dan sasaran Kementerian Sosial, dapat disimpulkan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah: “Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang diiringi dengan:

1. Ketersediaan *database* PMKS yang terus mengalami perbaikan/verifikasi.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan PMKS yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah dihilir, sementara akar masalah ini tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PMKS memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan Dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.

4. Sinergitas dan sinkronisasi program/anggaran yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
5. Perumusan strategi perlindungan dan pemberian jaminan sosial yang terintegrasi dengan program lain berkaitan dengan penanganan masalah sosial di daerah.
6. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
7. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkelanjutan. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PMKS itu sendiri.

1.4 **Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, disusun berdasarkan amanat peraturan perundang undangan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
2. Landasan Konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Gambaran umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

...(Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika)...

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Akuntabilitas Kinerja yang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Penjelasan mengenai nilai rata-rata capaian kinerja dan kategorinya, hambatan serta saran perbaikan.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2017–2022 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, target, kebijakan, program serta pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Dinas Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/238/KUM/2018 tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yaitu dengan tujuan : Meningkatkan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan sasaran Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2.1.1. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Sosial adalah Menurunnya Tingkat Kemiskinan Masyarakat Di Kabupaten Barito Kuala .

2.1.2. Sasaran

Sasaran Renstra Dinas Sosial adalah Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dibuat target kinerja yang akan dicapai, yaitu: “Presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mandiri”, melalui kegiatan :

1. Bantuan kepada anggota/kelompok masyarakat - peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kurang mampu di wilayah kab. Barito kuala bekerjasama dengan tim PKK 8 KK kategori keluarga miskin;
2. Pelatihan Keterampilan Masyarakat/Keluarga Miskin/PMKS sebanyak 100 orang.
3. Bantuan bedah Rumah Tak Layak Huni (RTLH) 1 (satu) KK kategori keluarga miskin Lanjut Usia;
4. Bantuan kursi roda untuk penyandang disabilitas sebanyak 4 buah;
5. Kegiatan Peserta pelatihan dan ketrampilan berbasis panti pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) sebanyak 18 orang dan Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) Banjarbaru untuk 15 orang anak dari keluarga miskin;
6. Pembinaan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) Anak Terlantar, bantuan bibit ternak kambing sebanyak 15 ekor untuk 30 orang anak dari keluarga miskin (1 kelompok);
7. Peserta sosialisasi bahaya penyalahgunaan Napza kepada 60 orang anak usia sekolah;
8. Peserta Sosialisasi Anti Kekerasan pada Kelompok Anak Beresiko (fisik, seksual, emosional dan ekonomi) kepada 30 orang anak di Kecamatan Tamban.

9. Bantuan paket sembako sebanyak 123 paket bagi Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau jandanya,;
10. Pendampingan bagi 8268 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (kategori Rumah Tangga Sangat Miskin) penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH);
11. Pemulangan orang terlantar, eks narapidana sebanyak 2 orang, dalam dan luar daerah kabupaten;
12. Verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS) sampai bulan Oktober 2020 terdapat 102798 Jiwa Keluarga Penerima manfaat yang sumbernya berasal dari SLRT SIKS-NG Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;
13. Pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis sebanyak 14 orang;
14. Hingga bulan Desember 2020 telah disalurkan bantuan logistik kepada masyarakat korban bencana alam puting beliung sebanyak 12 KK, bantuan logistik kepada masyarakat korban bencana sosial kebakaran sebanyak 57 KK dan bantuan berupa uang sebesar Rp.83.500.000,- kepada korban bencana alam puting beliung dan bencana sosial. Selain itu bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak pandemic Covid 19 sebanyak 20.222 paket bantuan.

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri

2.2. Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci. Hal ini penting karena memberikan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja tersebut instansi diharapkan fokus dalam mengelola program dan kegiatan, sehingga memperkecil kemungkinan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terarah. Pada tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memiliki satu sasaran dengan satu Indikator Kinerja yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri. Indikator ini didukung oleh 8 (delapan) program utama dan 4 (empat) program penunjang. Adapun 8 (delapan) program utama yaitu Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan anggaran Rp. 255.549.041,00, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp. 104.856.572,00, Program Pembinaan Anak Terlantar dengan anggaran Rp. 106.806.732,00, Program Pembinaan Eks

Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan anggaran Rp. 22.216.231,50, Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp. 262.181.988,25, Program Keluarga Harapan dengan anggaran Rp. 385.349.115,00, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran Rp. 3.332.251.819,00, Program Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu dengan anggaran Rp. 266.087.153,00. Sedangkan 4 (empat) program penunjang yaitu Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp.193.003.215,50, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 85.297.181,75, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp.28.196.043,00, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp.38.599.321,00.

Total anggaran Belanja Langsung dalam DPA Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.080.394.413,- (Lima Milyar Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun kedua dari kerangka pembangunan lima tahunan periode 2017-2022.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	%	1,50 %	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	255.549.041,00
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	104.856.572,00
					Program Pembinaan Anak Terlantar	106.806.732,00
					Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	22.216.231,50
					Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	262.181.988,25
					Program Keluarga Harapan	385.349.115,00
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.332.251.819,00
					Program Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu	266.087.153,00
TOTAL						4.735.298.651,80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2020, Renja Tahun 2020, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 460/056/Dissos/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022. Untuk mengukur capaian indikator Kinerja Utama adalah dengan menggunakan rumus selisih realisasi dan target, dimana capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2020 adalah sebesar 5,31 %, dengan Target 1,50 % dan Realisasi

sebesar 6,81 %. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	Persen	1,50 % (160 KK)	6,81 % (724 KK)	5,31 % (564 KK)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada :

Indikator 1.

Definisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2012 adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, sedangkan kriteria mandiri adalah terpenuhinya kebutuhan standar, dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun capaian indikator adalah sebesar 5,31 % (564 KK). menurut tabel 3.2, maka predikat capaian untuk realisasi capaian kinerja termasuk kategori sangat baik.

3.1.2. Pengukuran Kinerja atas Perjanjian Kinerja

No.	Uraian PMKS	Capaian 2020		%	Ket
		Target	Realisasi		
1.	Keluarga miskin yang menerima bantuan KUBE	70	0	0	
2.	Wanita rawan sosial ekonomi	40	0	0	
3.	Keluarga Miskin yang menerima bantuan peralatan rumah tangga	15	8	53,3	
4.	Penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan kerja berbasis panti	2	0	50	
5.	Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan stimulan usaha	4	4	100	
6.	Lansia Potensial yang menerima bantuan stimulan usaha	25	0	0	
7.	Lansia terlantar yang menerima bantuan bedah rumah	1	1	100	
8.	Anak terlantar yang dikembangkan bakat dan keterampilan kerjanya	40	35	87,5	
9.	Peningkatan pengetahuan, Sikap dan Keterampilan preventif terhadap kekerasan pada anak	44	44	100	
10.	Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan preventif terhadap penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya	30	30	100	
11.	Penanganan org terlantar, eks narapidana dan penyandang penyakit lainnya	18	2	0,1	
12.	Pemenuhan Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	20472	20283	99,0	
13.	Rumah Sangat Miskin (RTSM) yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya	10140	8268	81,5	

Tabel 3.1.2

Capaian IKU Dinas Sosial
Berdasarkan Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) yang mandiri
Tahun 2020

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	6
= 100	Tercapai/Sesuai target	4
>100	Melebihi target	-

Tabel 3.1.3

Capaian IK Dinas Sosial
Berdasarkan Kategori
Tahun 2020

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	4
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	2
5	Sangat kurang	0 – 49,99	4

Berdasarkan tabel diatas didapatkan 6 (enam) indikator dengan kategori sangat baik karena persentase capaian lebih dari 90 %, ada 5 (lima), indikator dengan kategori baik karena persentase capaian dibawah angka 90 % dan ada 1 (satu) indikator, sedangkan dengan kategori sangat kurang karena persentase capaian dibawah 50 % ada 4 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.4
Capaian IKU Dinas Sosial
Berdasarkan Kategori
Tahun 2020

No	IKU	Capaian (%)	Kategori
1	Keluarga miskin yang menerima bantuan KUBE	0	Sangat kurang
2	Wanita rawan sosial ekonomi	0	Sangat kurang
3	Pembinaan anak terlantar	100	Sangat Baik
4	Kelompok anak beresiko (fisik, seksual, emosional dan ekonomi)	100	Sangat Baik
5	Pelayanan NAPZA melalui pencegahan	100	Sangat Baik
6	Pelayanan kepada lansia yang menerima bantuan bedah rumah	100	Sangat Baik
7	Pelayanan terhadap Rumah Tangga Miskin	79,5	Baik
8	Pelayanan penyandang disabilitas	50	kurang
9	Korban bencana alam dan social	29	Sangat Kurang
10	Penanganan org terlantar, eks napi	2	Sangat Kurang
11	Pelayanan terhadap Keluarga bermasalah Sosial Psikologis	100	Sangat Baik

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1. Pengukuran Kinerja

Dalam laporan ini, Dinas Sosial dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini

didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Nomor : 460/056/DISSOS/2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Sosial

Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri
---------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	5,31 %	Tercapai/Sesuai Target

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2020, dapat mencapai 5,31% persen artinya capaian sasaran tercapai/sesuai target. Untuk memperoleh angka rata-rata capaian sasaran ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.3
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial
Berdasarkan IKU Tahun 2020

No	IKU	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	5,31 %	Sangat Baik

Tabel 3.2.4
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 -64,99 Kurang	65 -74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran	1	5,31 %					Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Tahun 2020 dengan jumlah indikator 1 (satu) secara keseluruhan dalam kategori Sangat Baik.

Tabel 3.2.5
Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Sosial
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	5,31 %	-	-	6		5	%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari satu indicator sasaran terdapat 6 (lima) indikator yang tingkat pencapaiannya telah sesuai target dan ada 5 (enam) indikator dibawah target.

3.2.2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi atas capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja pada indikator yang sama tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dalam periode perencanaan lima tahunan. Capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2020 sebesar 79,6 Persen kurang dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 81,9 Persen. Hal ini terjadi pada saat Pemerintah menghadapi wabah pandemic covid dimana Dinas Sosial juga memberikan peran dan dukungan anggaran terhadap penanganan covid 19 beserta dampaknya kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Untuk melihat capaian evaluasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini
dengan Realisasi Tahun Lalu

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Tahun	Selisih Capaian	Ket
			2019	2020		
			Capaian %	Capaian %		
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	92,3	5,31	-86,99	Menurun

Sumber data : Bidang Dinas sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020

Adapun beberapa Capaian indikator sasaran yang mempengaruhi terhadap penurunan capaian adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan yaitu Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan berupa Meningkatkan Kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
3. Program Pembinaan Anak Terlantar dengan kegiatan yaitu Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dan kegiatan Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar
4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) dengan kegiatannya yaitu Pemulangan orang/anak terlantar dan eks narapidana dalam/luar daerah dan kegiatan Sosialisasi napza dan anti kekerasan pada kelompok anak beresiko (fisik, seksual, emosional dan ekonomi)
5. Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan : Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan
6. Program Keluarga Harapan dengan kegiatan : Pelayanan keluarga harapan
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan : Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
8. Program Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu dengan kegiatan: Pelayanan dan rujukan keluarga miskin.

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra
Dinas Sosial

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target	Capaian (%)	Keterangan
				Akhir Renstra		
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persen	6,81 %	100 %	5,31 %	

3.2.3. Analisa Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja Dinas Sosial sangat baik, sebesar 5,31 %, sudah berada diatas target yang ditetapkan sebesar 1,50 %. Capaian ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid dimana proiritas kegiatan ada pada kegiatan yang mengampu penanganan untuk orang yang tidak mampu/terdampak covid 19, sehingga memberikan perubahan terhadap struktur belanja Daerah. . Adapun capaian realisasi kinerja dengan kegiatan yang mencapai 100,00 % adalah Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Berikutnya adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan realisasi 79,5 %, diikuti oleh jenis pelayanan lainnya yaitu pelayanan disabilitas dan pelayanan kepada kelompok anak beresiko (Fisik, seksual, emosional) dengan realisasi 50 %. Adapun jenis pelayanan dengan realisasi 29 % adalah Pelayanan pada korban bencana alam dan social, 2 % untuk realisasi penanganan orang terlantar, eks napi.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya mempunyai kegiatan

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dengan target memberikan bantuan kepada keluarga miskin berupa bantuan usaha Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Akan tetapi bantuan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anggaran diberikan untuk

mendukung pelayanan terhadap penanganan covid di Kabupaten Barito Kuala. Adapun kegiatan yang dapat terlaksana adalah bantuan sarana dan peralatan rumah tangga Kegiatan Bedah Rumah Ala PKK untuk 8 KK.

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

dengan kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS mempunyai kegiatan yang dapat direalisasikan yaitu bantuan Bedah Rumah tak layak huni 1 buah, dan pemberian kursi roda kepada penyandang disabilitas sebanyak 4 buah..

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR dengan kegiatan Pengiriman anak terlantar mengikuti pelatihan dan ketrampilan di Panti PSBR / PSBW 33 org, Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Napza (60 org), kegiatan Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar berupa Praktek belajar bagi anak terlantar mengembangkan usaha berternak kambing kepada 30 orang anak (15 ekor ternak kambing).

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA) dengan kegiatan Pemulangan Orang/Anak terlantar dan Eks Narapidana Dalam/Luar Daerah sebanyak 1 Orang dan Sosialisasi Napza dan Anti Kekerasan pada Kelompok Anak Beresiko (Fisik, seksual, Emosional dan Ekonomi).

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

dengan kegiatan Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat berupa pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebanyak 5 buah, Rapat Koordinasi PSKS, kemudian kegiatan Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat berupa Jumlah Karang Taruna yang aktif dan berwawasan 17 kelompok dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial serta Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan berupa Jumlah hari keperintisan/kepahlawanan yang diperingati (3 kegiatan), Tali asih bagi para pejuang (121 paket), Peringatan Hari Pahlawan, Wafatnya

Pangeran Antasari dan Peringatan Perjuangan Rakyat Marabahan (3 kegiatan). **PROGRAM KELUARGA HARAPAN** dengan kegiatan Pelayanan Keluarga Harapan berupa Pendampingan dan pemberian bantuan tunai bersyarat bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebanyak 8064 KPM lingkup Kabupaten Barito Kuala. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial** dengan kegiatan Bantuan sosial Korban bencana alam dan bencana sosial berupa Pendataan dan pemantauan pasca bencana oleh petugas dari Dinas Sosial dan anggota Tagana. Pemberian insentif bagi anggota TAGANA (41 org), Penjaga Perahu Dolphin (1 org), Sopir Truk (1 org) dan pengelola gudang logistik (1 org) dan Pengadaan logistik dan perlengkapan rumah tangga bagi korban bencana alam dan atau bencana sosial (200 Paket) untuk Penyaluran buffer stock bagi korban bencana dan 20.22 paket untuk dibagikan sebagai bantuan kepada masyarakat tidak mampu/yang terdampak covid 19.

Kelancaran program/ kegiatan diatas didukung pula oleh program/kegiatan internal. Terdapat empat program internal yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri 12 kegiatan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 kegiatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri 1 kegiatan, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 kegiatan yakni Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

Adapun Indikator dengan kategori yang Tidak Tercapai disebabkan kondisi pandemic covid 19 dimana pusat-pusat rehabilitasi dan panti-panti social melaksanakan penundaan

terhadap semua kegiatan yang dapat diakses oleh Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS) baik diluar kabupaten maupun diluar provinsi yang menjadi mitra Kerjasama selama ini dengan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu pula terbatasnya anggaran yang tersedia tidak mencukupi terhadap kejadian yang bersifat situasional seperti bantuan sosial pada bencana alam hanya diberikan ketika terjadi puting beliung, kebakaran dan banjir sehingga target tidak tercapai.

Pelayanan terhadap orang terlantar dan eks napi juga tidak mencapai target disebabkan jumlah yang membutuhkan pelayanan tersebut juga bersifat situasional dimana target yang ingin dicapai berjumlah 50 orang sedangkan yang mengakses layanan tersebut hanya 15 orang padahal secara anggaran telah disediakan maksimal.

Selain itu, kegagalan capaian Indikator Sasaran yaitu Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri disebabkan oleh faktor-faktor alam seperti bencana kebakaran, banjir dan puting beliung yang sulit diprediksi, terbatasnya anggaran dan sifatnya situasional seperti pemulangan orang terlantar.

Saran yang dapat disampaikan adalah secara spesifik agar anggaran ditambah untuk pelayanan maksimal terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti untuk bedah rumah, bantuan logistik untuk korban bencana alam dan sosial, juga jenis pelayanan yang sudah menjadi standar pelayanan minimal sehingga target dapat dicapai dan secara kualitas pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat lebih ditingkatkan.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memperoleh sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020. Anggaran

tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan dinas selama Tahun 2020 melalui belanja langsung maupun tidak langsung.

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 7.327.039.203,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.7.057.384.527,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 96.32 %.

Komposisi belanja Dinas Sosial untuk tahun 2020,dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.22
Komposisi Belanja Dinas Sosial
Tahun Anggaran 2020
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	5.080.394.413,00	4.838.117.506,00	97.99
2	Belanja Tidak Langsung	2.246.644.790,00	2.219.267.021,00	98.78
Jumlah		7.327.039.203,00	7.057.384.527	

Sumber: Data Keuangan Dinas Sosial 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 97,99 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2020, dan sisanya sebesar 2,01 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.219.267.021 dengan realisasi sebesar Rp. 98,78 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Dinas Sosial
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Realisasi	%
1	Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.403.046.832,80	1.248.252.744,00	88,96
		1.403.046.832,80	1.248.252.744,00	88,96

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan telah dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2020.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.25
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	5,31	1.248.252.744,00	88,96
		Jumlah	1	5,31	1.248.252.744,00

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2020 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial.

Adapun Analisis efisiensi dalam penggunaan anggaran dicapai melalui : perbandingan persentase rata – rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui pembandingan antara persentase rata –rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran sebagai berikut : Efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata – rata capaian kinerja sasaran Tidak efisien, jika persentase rata – rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata – rata capaian kinerja sasaran/ Hasil analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Sosial dari rencana pembiayaan dalam pencapaian 1 (satu) sasaran strategis dengan 13 (Tiga Belas) sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 1.403.046.832,80 dengan realisasi anggaran Rp. 1.248.252.744,00 atau 88,96 % untuk mencapai sasaran dengan rata-rata capaian sebesar 5,31 %, masuk kategori efisien sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.25

Efisiensi Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020

No	Sasaran	Rata -rata Tingkat Capaian Kinerja %	Anggaran		Keterangan
			Realisasi	%	
1	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5,31	1.248.252.744,00	88,96	Efisien
	Jumlah	5,31	1.248.252.744,00	88,96	

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam pencapaian Vsi dan Misi selama tahun anggaran 2020 LKIP Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 ini menggambarkan keberhasilan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Pada tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai satu sasaran dengan satu indikator kinerja sesuai dengan rencana Kinerja tahunan. Dari hasil capaian program dan kegiatan tersebut nilai kuantitatif secara keseluruhan umumnya baik. Beberapa masalah yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran sehingga memerlukan solusi penambahan anggaran dari daerah.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun anggaran 2020 pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala LKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan inplementasi rencana kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) dimasa masa mendatang.

Marabahan, Februari 2021

Gambar 1
Pengepakan dan Pelepasan Bantuan Sembako Covid Oleh Bupati Barito Kuala



Gambar 2
Menyerahkan Bantuan Kursi Roda pada Anak Penyandang Disabilitas



Gambar 3
Penyerahan Sertifikat Penghargaan Graduasi Berdikari Sejahtera Secara Simbolis. Untuk Peserta PKH yang sudah keluar dari Kepesertaan Secara Mandiri.





Gambar 4
Monitoring Bantuan Ternak Kambing di Desa Parimata Kecamatan Belawang



Gambar 5
Kegiatan seleksi PSBR dan PSBW di Dinas Sosial





Gambar 6
 Rehab rumah tidak layak huni untuk lanjut usia





Gambar 7
Bantuan Korban Kebakaran 9 KK



Gambar 8
Pelatihan Keterampilan Membuat Kue Bagi Masyarakat/ KPM Tahun 2020 di Kecamatan
Mekarsari



Gambar 9
Penyerahan Bantuan Kambing untuk KUBE "KOLAM BERKAH" Desa Bagagap



Gambar 10
Kegiatan Bimbingan Lanjut Sekaligus Terminasi Eks Klien Panti Sosial Bina Wanita Melati
Prov. Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020



Gambar 11
Kegiatan memperingati hari Pahlawan dan pemberian tali asih kepada veteran/janda veteran





Gambar 12

Bimtek aplikasi SKRT - SIKS NG bagi petugas Desa/ Kelurahan dalam percepatan pematkhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Barito Kuala

